

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL/KULIT MUKA	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRACT	
ABSTRAK	
LEMBAR PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA

A. Aspek Hukum Pidana Dari Tersangka	31
1. Pengertian Hukum Pidana	31
2. Fungsi Hukum Pidana	33
3. Pengertian Tindak Pidana	37
4. Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kebijakan Hukum Pidana.....	39
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	44
B. Pengertian Kepala Daerah Dan Tersangka.....	47
1. Pengertian Kepala Daerah	47
2. Pengertian Tersangka.....	51
3. Hak-Hak Tersangka	53

BAB III	TENTANG CALON KEPALA DAERAH DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI TERSANGKA	
	A. Tahap Pendaftaran Dan Pencalonan Kepala Daerah.....	57
	B. Pelantikan, Pemberhentian Dan Mekanisme Pergantian.....	70
	C. Kasus Posisi.....	78
BAB IV	KEDUDUKAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP JO UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	
	A. Kedudukan Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Kuhap Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dihubungkan Dengan Asas-Asas Hukum Pidana.....	87
	1. Asas Legalitas	88
	2. Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i>	94
	3. Asas Pra Duga Tak Bersalah.....	97
	B. Penanggulangan Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Melakukan Perbuatan Pidana Dihubungkan Dengan Tahap-Tahap Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1	

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang	101
1. Tahap Pencalonan	101
2. Tahap Verifikasi.....	104
3. Tahap Kampanye	108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN